PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

UNIT KERJA : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANAN WISNAGA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **647625**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 833.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/144 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 253.950.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.950.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, KTM 65 SE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, VIAR MINI MOTO 100 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH S Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 203.000.000
6. MOTOR, YAMAHA FORCE 1 / KELAS BEBEK STANDAR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 25.600.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 200.000.000**

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**189.806.845**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**880.000.000**
	Sub Total	**Rp.**	**2.382.356.845**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**133.822.972**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.248.533.873**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.